



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Oktober 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SALAHUDDIN MAHMUD
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 84025

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.016.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di LANGSA , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah Seluas 772 m2 di ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 606 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 661 m2 di ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. Tanah Seluas 536 m2 di ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 461 m2 di ACEH TIMUR, Rp. 75.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/56 m2 di LANGSA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di ACEH BESAR, Rp. 110.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/100 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 260.500.000**

1. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL



SENDIRI Rp. 4.000.000

4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 SMT Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.833.063**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.346.433.063**III. HUTANG** Rp. 180.831.750**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.165.601.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.